ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitias pembangunan program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan kuta kareung Kota Lhokseumawe. Metode penelitian memakai pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan Ikan Kuta Kareung Kota Lhokseumawe dilihat dari aspek Akuntabilitas Program yang diukur dengan 4 indikator meliputi; pertama transparansi, dari pihak terlibat masih belum maksimal disebabkan ada sebagian masyarakat setempat belum sepenuhnya mengetahui detail informasi pengembangan infrastruktur Pasar Sayur dan Pelelangan Ikan Kuta Kareung. Kedua pelaporan, dilakukan pihak pelaksana sudah tepat. Namun jika berlandaskan pemberian pelaporan kepada publik tidak sepenuhnya publik mengetahui. Ketiga evaluasi, menemukan bahwa Disperindagkop melakukan proses evaluasi yang dilakukan meliputi pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Keempat partisipasi dalam penanganan program renovasi Pasar Sayur dan Pelelangan Ikan di Kuta Kareung melibatkan beberapa pihak utama, dengan penekanan pada keterlibatan masyarakat lokal. .Selain itu tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas program infrastruktur pasar sayur dan pelelangan ikan kuta kareung Kota Lhokseumawe diukur dalam 5 dimensi meliputi, pertama Perencanaan Kerja menunjukkan bahwa Disperindagkop berencana untuk meninjau perencanaan kinerja program infrastruktur demi menciptakan pentingnnya transparasi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kedua, Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah menetapkan komitmen akan menjaga kualitas pembangunan infrastruktur yang sesuai SOP. Ketiga, Pelaporan kinerja pemerintah desa masih sering menemukan kinerja yang belum sesuai dengan aturan teknis. Keempat Evaluasi Internal menunjukkan bahwa Disperindagkop telah melakukan evaluasi internal untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan SOP yang berlaku. Kelima, Pencapaian Kinerja menunjukkan bahwa pemerintah gampong belum dapat dinilai dari capaian kinerja secara menyeluruh karena program masih dalam tahap perencanaan

Kata Kunci : Akuntabilitas,Infrastruktur Pasar, Pemerintah, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and describe the accountability of the development of the Kuta Kareung vegetable market and fish auction infrastructure project in Lhokseumawe City. The research method used a qualitative approach through observation and interviews. The results of the study showed that the accountability of the Kuta Kareung vegetable market and fish auction infrastructure project in Lhokseumawe City was seen from the aspect of Program Accountability which was measured by 4 indicators including; first transparency, from the parties involved is still not optimal because some local people do not fully know the details of the development of the Kuta Kareung Vegetable Market and Fish Auction infrastructure. Second reporting, carried out by the implementing party is correct. However, if the provision of reporting to the public is not fully known to the public. The third evaluation found that the Disperindagkop carried out an evaluation process which included continuous supervision of the quality of the work produced. The fourth participation in handling the reconstruction project program for the Kuta Kareung Vegetable Market and Fish Auction involved several main parties, with an emphasis on local community involvement. .In addition, the follow-up of the results of the accountability evaluation of the Kuta Kareung vegetable market and fish market infrastructure project in Lhokseumawe City is measured in 5 dimensions including, first, Work Planning shows that the Trade and Cooperatives Office plans to review the performance planning of infrastructure projects in order to create the importance of transparency and accountability to the community. Second, Performance Measurement shows that the Village Government has made a commitment to maintain the quality of infrastructure development in accordance with SOPs. Third, Village government performance reporting still often finds performance that is not in accordance with technical regulations. Fourth, Internal Evaluation shows that the Trade and Cooperatives Office has conducted an internal evaluation to ensure compliance with applicable policies, procedures, and SOPs. Fifth, Performance Achievement shows that the village government cannot yet be assessed from overall performance achievements because the project is still in the planning stage.

Keywords : *Accountability, Market Infrastructure, Government, Aceh Special Autonomy Fund (DOKA).*